
**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA YAYASAN BAITUL MAAL BRILiaN
REGIONAL OFFICE MANADO**

Vidya Putri Sadjiman¹, David P. E. Saerang², Jessy D. L. Warongan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Jl.
Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email: vidyasadjiman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the phenomenon of accountability for zakat management at the Zakat Foundation called YBM BRILiaN who basically distributed zakat fund from muslim employees in BRI. The qualitative research method with a case study approach is used to describe the accountability of zakat management at YBM BRILiaN in Regional Office Manado. The object of this research is YBM BRILiaN Regional Office Manado who handled distributed of zakat fund in four provinces, those are North Sulawesi, Central Sulawesi, North Maluku and parts of West Sulawesi. The Data were collected through interviews with informants. The phenomena encountered are then analyzed and described using Islamic paradigm and the theory of public accountability and indicators of transparency. The results showed that zakat management at YBM BRILiaN in whole has been accountable because the processes that implementing from the mapping the budget until the reporting already followed the standard operating procedures who made by the decision of rules of government and consideration with all parties involved. The website dan social media owned by YBM BRILiaN become source of information about activities, program and also report of zakat management.

Keywords: zakat, accountability, transparency

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar, sehingga memiliki potensi zakat yang sangat besar. Zakat merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial di bidang ekonomi karena dinilai mempunyai aspek interaksi sosial dan politik (Fitri dkk,2021). Berdasarkan informasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun di tahun 2019. Potensi tersebut terdiri dari beberapa jenis zakat yang dapat dihimpun. Antara lain zakat pertanian sebesar Rp19,79 triliun, zakat peternakan Rp19,51 triliun, zakat uang atau simpanan sebesar Rp58,76 triliun, zakat perusahaan Rp6,71 triliun, serta zakat penghasilan sebesar Rp39,07 triliun. Pada tahun 2020, potensi zakat nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan menunjukkan potensi zakat meningkat menjadi sebesar Rp327,6 triliun di tahun 2020 dan jika ditarik dalam presentase dapat disimpulkan potensi zakat yang dimiliki Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 140 persen.

Dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia yang kita ketahui bersama ada Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan BAZNAS yang mengurus pengumpulan dan penyaluran zakat dan tersebar di setiap provinsi dan kota/kabupaten. Selain BAZNAS ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang penyaluran zakat seperti Dompot Dhuafa, Rumah zakat, Forum Zakat dan ada juga Yayasan Baitul Maal (YBM) yang tersebar di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini adalah BRI dan PLN. Penelitian ini difokuskan untuk

menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di salah satu lembaga zakat BUMN (BRI) yaitu YBM BRILiaN.

YBM BRILiaN merupakan lembaga filantropi islam yang mengelolah dana zakat, infaq dan sedekah yang dilaksanakan secara profesional sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011, Keputusan Menteri Agama dan fatwa DSN MUI. YBM BRILiaN adalah bentuk transformasi dari sebelumnya yaitu YBM BRI yang dimana berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas vertikal keluarga dhuafa melalui serangkaian program Pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, serta program sosial kemanusiaan sehingga 4 terwujud masyarakat berdaya. YBM BRILiaN mempunyai Kantor Pusat yang bertempat di Jakarta dan tersebar di 18 (delapan belas) kantor wilayah yang ada di Indonesia mengikuti penyebaran kantor wilayah BRI.

Sehubungan dengan luasnya wilayah penyerbaran yang dicangkup oleh YBM BRILiaN, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan untuk menganalisis terkait pencatatan pelaporan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) yang ada di YBM BRILiaN kantor wilayah Manado apakah sudah akuntabel dan transparan sebagaimana mestinya atau justru masih jauh dari sempurna. Ada beberapa hal yang dilauan oleh YBM BRILiaN itu sendiri dalam memastikan terkait akuntabilitas dan transparansinya yaitu antara lain adalah survey, monitoring serta audit internal sebagai bentuk evaluasi. Berdasarkan dengan adanya internal audit berikut lampiran temuan atas pemeriksaan yang dilaksanakan pada periode November 2022 hasil temuan begaimana terlampir.

Tabel 1. Rangkuman Temuan Audit Internal Periode 2021-2022

No	Nama Program	Divisi	Temuan Audit	Keterangan
1	<i>My Scholarship</i>	Pendidikan	Ditemukan 5 penerima manfaat yang tidak sesuai dengan SOP	<i>Fair</i>
2	<i>Smart Scholarship</i>	Pendidikan	Ditemukan 3 orang yang tidak sesuai SOP terkait proses pencairan dana dan 1 orang yang tidak masuk kriteria.	<i>Fair</i>
3	WASH	Sosial	Ditemukan vendor yang handle proyek tidak sesuai dengan SOP.	<i>Fair</i>
4	<i>Gerobak</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ditemukan 2 penerima gerobak tidak sesuai kriteria atau bukan asnaf dan 1 penerima yang gerobaknya tidak sesuai kebutuhan.</i>	<i>Fair</i>

Sumber: Bagian Administrasi dan Keuangan YBM BRILiaN RO Manado

Berdasarkan dengan temuan audit pada tabel 1 menjadi menjadi gap untuk bisa memastikan apakah proses yang diterapkan dalam YBM BRILiaN sudah akuntabel dan transparan atau belum. Menurut Latief et al. (2021) Peraturan 10 pengelolaan zakat telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta pedoman penyusunan laporan akuntansi dana zakat sudah ada yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Pengelolaan zakat tidak lepas dari fungsi pengelolaan organisasi zakat itu sendiri. Maka dari itu proses akuntansi yang terlaksana dalam lembaga tersebut harus transparan dan juga akuntabel dari

mulai penghimpunan, pengalokasian dana sampai distribusi program karena pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia namun juga kepada Allah SWT.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Planner Behavior Theory berasal dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* dikembangkan pada tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Pada tahun 1980, teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih tepat. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan kontrol perilaku pada model reasoned action yang sudah ada tersebut, kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Prediksi perilaku konsumen secara akurat dilakukan para ahli dalam berbagai penelitian. *Theory of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang tidak sepenuhnya berada dibawah kontrol seseorang yang belum lengkap dalam teori tindakan beralasan. Inti dari *Theory of Planned Behavior*, tetap berada pada faktor intensi perilaku namun determinan intensi tidak hanya sikap dan norma subjektif melainkan juga aspek kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*). Namun kontrol keperilakuan yang dirasakan dianggap mempunyai implikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memprediksi perilaku konsumen. Ketiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan berinteraksi dan menjadi determinan bagi minat yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak (Tamba:2017).

Teori Keagenan merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara prinsipal (*pemberi kontrak*) dan agen (*penerima kontrak*). Prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan (Supriyono dalam Latief dkk, 2021). Diterangkan dalam artikel yang di posting oleh Kompasiana terkait teori keagenan setidaknya mempunyai tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak.
2. Meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun agen dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil.

Teori Keagenan (*Agency theory*) digunakan untuk melihat akuntabilitas sebagai konsekuensi logis dari hubungan antara agen dan prinsipal. Dalam hal ini teori keagenan akan menjelaskan bagaimana kinerja Yayasan Baitul Maal 18 BRILiaN Kanwil Manado yang menjadi objek penelitian sebagai agen yang mengelola dana zakat dengan pemberi zakat (muzaki) sebagai prinsipal agar dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat yang telah diterimanya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban horizontal kepada muzaki (Latief et al., 2021)

Teori Akuntabilitas Publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dikutip dari modul diklat BPS Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi maa membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan "ke bawah" yaitu kepada publik. Teori akuntabilitas vertikal ini akan menjelaskan bagaimana implementasi akuntabilitas Yayasan Baitul Maal BRILiaN Regional Office Manado yang menjadi obyek penelitian terhadap dana zakat yang telah diterima dari

para pemberi zakat (muzaki), berdasarkan kewenangan tingkat dasar hingga tertinggi

Transparansi Menurut buku Pemberian Boadel Pailit (Nainggolan, 2015) transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Terciptanya transparansi akan mampu memberikan akibat yang baik bagi pengawasan organisasi. Tentunya hal ini akan mensugesti dan mendorong muzakki buat memilih lembaga zakat. Transparansi akan menjalin hubungan saling percaya antara komunitas muzakki menggunakan pengelola zakat. Pada Islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan info, instansi wajib amanah, dalam hal ini organisasi publik tidak menyembunyikan apapun kepada masyarakat (Atmaja dkk, 2021). Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada tiga prinsip utama yang harus dipegang tegul oleh para lembaga amil zakat yaitu:

1. Aman Syar'i
2. Aman Regulasi
3. Aman NKRI

Akuntansi Zakat merupakan alat yang digunakan dalam mengolah informasi kelembagaan pengelola zakat sebagai manajemen dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi yang akan disajikan. Akuntansi zakat selalu berhubungan terhadap 3 hal dasar yaitu penyajian informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Adapun tujuan dari akuntansi zakat yaitu:

1. Memberi informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien terkait zakat, infak/sedekah, wakaf, hibah yang diberikan kepercayaan kepada suatu lembaga
2. Memberi informasi untuk melaporkan kegiatan – kegiatan yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan, menjalankan program dan penyaluran zakat yang tepat dan efektif.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui paradigma agamawan, yang tercermin dalam model kerangka berpikirnya adalah pendekatan agamawan kualitatif. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami secara utuh dan menyeluruh terkait penerapan standard operating procedure (SOP) dalam pelaksanaan program yang dijalankan dan standar akuntansi yang di implementasikan sudah transparan, akuntabel dan sesuai dengan indikator yang diatur dalam PSAK 109 terkait pelaporan akuntansi zakat dan indikator pengukuran transparansi di Yayasan Baitul Maal BRILiaN Regional Office Manado. Penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode penelitian studi kasus adalah penelitian yang menguraikan penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi sehingga pada penelitian tersebut peneliti harus mengolah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2018). Alasan menggunakan metode studi kasus karena peneliti dapat menarik kesimpulan dari beberapa fenomena yang terjadi untuk menentukan seberapa transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara kepada beberapa narasumber bidang keuangan dalam lembaga zakat Yayasan Baitul Maal BRILiaN Regional Office Manado itu sendiri. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive yang artinya tidak semua orang menjadi objek penelitian namun lebih ke orang-orang yang memenuhi ketentuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat baik dalam kepengurusan sampai dalam pelaksanaan di lapangan yang ada di YBM BRILiaN RO Manado. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling

purpose yang artinya tidak semua orang menjadi objek penelitian namun lebih ke orang-orang yang memenuhi ketentuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat baik dalam kepengurusan sampai dalam pelaksanaan di lapangan, sample dalam penelitian ini hanya 8 (delapan) pegawai yang ada di YBM BRILiaN RO Manado yang rata-rata mempunyai basic keuangan. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi kredibilitas data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, selain mengumpulkan data digunakan dalam penelitian sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk tracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya (Sugiono, 2011).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Yayasan Baitul Maal BRILiaN

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diperoleh informasi bahwa pengendalian internal di Yayasan Baitul Maal BRILiaN sudah cukup kuat untuk ukuran sebuah organisasi namun masih membutuhkan pengembangan lagi dikarenakan budaya yang tercipta seperti "getok baru mau kerja" itu menjadi suatu hambatan yang mengakibatkan banyak hal yang tertunda di awal tahun dan menjadi menumpuk di akhir tahun, dalam periode ini juga hal tersebut masih terjadi namun tidak begitu signifikan karena presentase pencapaian target di pertengahan tahun menunjukkan hasil yang cukup baik, namun tetap perlu pemaksimalan anggaran di akhir tahun agar mencapai seratus persen. Penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Yayasan Baitul Maal BRILiaN berpedoman pada aturan dalam pasal 1 UU Nomor 23 yang dimana menjelaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hasil wawancara yang didapatkan sesuai dengan fungsi utama dari penerapan akuntabilitas yaitu untuk mencegah korupsi atau penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pendayagunaan anggaran atau penghimpunan dana. Dalam penerapan akuntabilitas harus sesuai dengan indikator sebagaimana yang dijelaskan oleh BAPPENAS yaitu adalah sebagai berikut.

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan outcome yang terukur

Dari hasil wawancara dengan informan dari YBM BRILiaN ketiga indikator diatas memang sudah diterapkan sejak awal dan kami juga melakukan audit untuk menjaga kesesuaian terkait dengan kinerja dan laporan keuangan selama ini. Selain itu ada dewan pengawas syariah juga yang mengawasi kami dalam penyaluran bantuan sampai dengan laporan pertanggungjawaban juga harus sesuai dengan prinsip yang berlaku dan penerima bantuan harus sesuai dengan golongan asnaf yang ada. Opini dari dewan pengawas syariah dalam setiap penyaluran bantuan sesuai dengan 3 prinsip utama lembaga zakat yaitu aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Maka dari itu pemetaan program sampai dengan penyaluran bantuan yang terlaksana dalam YBM BRILiaN selama ini tidak jauh dari prinsip tersebut sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dalam lembaga.

Analisis Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Yayasan Baitul Maal BRILiaN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, pengukuran transparansi di suatu lembaga dibagi atau dua cara yaitu pertama berdasarkan dengan kriteria dan yang

kedua berdasarkan prinsip transparansi itu sendiri. Jika ditinjau dari kriteria ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh lembaga agar bisa dikatakan transparan dalam penerapan hingga pelaporan program atau kegiatan, berikut kriteria yang harus dipenuhi.

1. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
3. Ada sistem pemberitahuan informasi kepada publik

Dari hasil wawancara dengan bentuk transparansi dari segi pelaporannya selalu sajikan informasi se-transparan mungkin ke perwakilan muzakki yaitu dalam hal ini badan pengurus di rapat dengan pengurus sekaligus doa untuk muzakki setiap bulannya agar pengurus mengetahui performance dan hambatan kita dalam setiap bulannya. Untuk skala tahunan di annual report juga ada laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban tahunan yang dimana annual report tersebut dipublish ke website resmi YBM agar bisa diakses oleh masyarakat umum. Bentuk transparansi lainnya dapat dilihat dari penyusunan RKAT yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi secara terbuka antara perwakilan muzakki dalam hal ini badan pengurus dan para amil yang diwakili oleh regional supervisor di seluruh Indonesia yang mengelola dana agar kita bisa mengetahui seperti apa para amil dalam menjalankan amanah yang berikan saling sharing dan memastikan terkait ketepatan pendistribusian anggaran. Untuk transparansi ke ranah publik kita juga melaporkan via media sosial dan media cetak lainnya agar masyarakat bisa mengetahui terkait dana zakat yang ada dan dipergunakan untuk apa. Sebagai laporan terkait seluruh kegiatan yang dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban satu periode secara transparansi juga ke masyarakat atau dalam hal ini muzakki. Sosial media menjadi salah satu tools yang dimaksimalkan YBM BRILiaN untuk memberikan informasi secara transparan, cepat dan paling up to date

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dapat diuraikan menjadi 2 (dua) poin penting yaitu adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada 7 (tujuh) orang informan yang merupakan amil yang bertanggungjawab dalam perencanaan anggaran sampai dengan tersalurnya anggaran zakat infak dan sedekah (ZIS) menunjukkan hasil yang dimana YBM BRILiaN telah menerapkan sistem akuntabilitas dengan cukup maksimal baik dalam pengalokasian dana sampai dengan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran dana. Hal ini dibuktikan oleh laporan satu periode berjalan yang sudah diperiksa oleh audit internal dan telah menghasilkan judgement public dari audit eksternal dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimana hasil yang diraih bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.
2. Sedangkan dari segi transparansi YBM BRILiaN banyak memaksimalkan tools yang simple namun cukup efektif yaitu dengan meningkatkan intensitas informasi terkait penyaluran program ataupun jumlah pengihimpunan terkini melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan Website resmi mereka. Selain digital YBM BRILiaN juga masih menggunakan media massa berupa koran dalam menyebarkan informasi terkait pendayagunaan dana zakat melalui program – program yang sudah selesai pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), *The handbook of attitudes*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
-

-
- Amalia, N. & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat (Studi pada Laz Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9), 1756-1769. doi: <https://dx.doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769>
- Ardianis. (2018). Peran zakat dalam Islam. *Al-Intaj* 4(1), 125-140. doi: <https://research.amanote.com/publication/ZaEL4nMBKQvf0BhiR3bG/peran-zakat-dalam-islam>
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2021). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan. *Journal of Islamic Accounting Competency (J-ISACC)*, 71-85. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/view/926>
- Barlian, MS, (2016). Metode peneliatian kualitatif dan kuantitatif. In P. D. MS, metode peneliatian kualitatif dan kuantitatif. Padang: Sukabina Press. <https://doi.org/10.31227/osf.io/aucjd>
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model pengelolaan zakat saham dan investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFes)*, 196-211. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/3287> <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hidayat, A & Mukhlisin. (2020). Analisis pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online dompet dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675-684. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Humas BAZNAS. (2022). BAZNAS kedepankan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Article. https://www.baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Kedepankan_Transparansi_dalam_Pengelolaan_Dana_Zakat/1169
- Latief, N. F., Saerang, D. P., Karamoy, H., & Murni, S. (2021). The accountability of zakat management in BAZNAS of North Sulawesi. *Annals of R.S.C.B.*, 25(2), 2537 - 2546. <http://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/1218/1023>
- Mulyana, D. (2018). Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, D. B. (2015). Transparansi dalam pemberesan boedel pailit. Bandung: PT. Alumni 2015.
- Selviyana, & Junaedi, W. (2020). Faktor - Faktor yang mempengaruhi minat implementasi PSAK No. 109 pada organisasi pengelola zakat di Kota Balikpapan. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani* 6(2), 36-47. doi: https://www.semanticscholar.org/paper/FAKTOR-FAKTOR-YANG-MEMPENGARUHI-MINAT-IMPLEMENTASI-Selviyana-Junaedi/7ddcb50c754cf1fcaebc7dc48bfc55297df5eede?utm_source=direct_link
- Sugiono. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung,
- Syahnaz , S. (2016). Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara . *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015*, Hal. 315-324. doi : <https://media.neliti.com/media/publications/2825-ID-penerapan-psak-no109-tentang-pelaporan-keuangan-akuntansi-zakat-infaksedekah-pad.pdf>
- YBM BRILian. (2024) tentang Yayasan Baitul Maal BRILian. <https://ybmbriilian.id/tentang-kami/>
-